

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan pengujian dengan melakukan olah data. Data yang digunakan dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan dimulai dari tahun 2013-2018. Olah data yang dilakukan menggunakan sampel yang telah ditentukan peneliti dengan kriteria tertentu. Kriteria dalam sampel ini adalah tidak adanya publikasi laporan keuangan di BEI maupun di web resmi milik perusahaan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 340 dari seluruh perusahaan yang berdiri dibidang *property*, *real estate* dan *building construction*. Jumlah sampel tersebut juga sudah melalui seleksi dari kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Tabel seleksi kriteria sampel ada pada lampiran 3. Tetapi karena adanya masalah dalam pengujian normalitas maka sampel dalam penelitian ini berkurang menjadi 270 sampel.

4.2 Statistik Deskriptif

Pada bagian kedua di dalam bab ini, akan menjelaskan mengenai statistik deskriptif pada penelitian ini. Analisis statistik deskriptif dapat memberikan

suatu deskripsi atau gambaran sebuah data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (SD) dari variabel-variabel penelitian ini. Berikut merupakan tabel hasil statistik deskriptif untuk keseluruhan perusahaan di bidang *property, real estate & building construction* dari tahun 2013 hingga 2018 :

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif

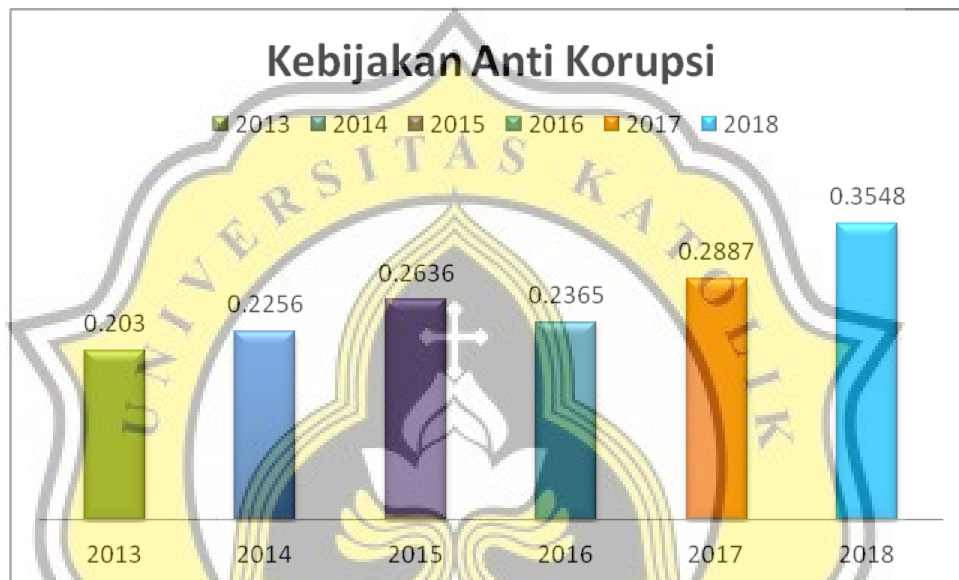
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KebijakanAntiKorupsi	270	.00	.86	.2723	.18572
IndependensiDewanKomisaris	270	.00	.83	.3930	.11330
KompetensiKomiteAudit	270	.00	1.00	.5671	.29943
KepemilikanInstitusional	270	.00	.95	.5259	.23529
KepemilikanManajerial	270	.00	.84	.0412	.14346
KepemilikanBlockholder	270	.05	.95	.5803	.19830
KepemilikanPemerintah	270	.00	.68	.0520	.16508
TataKelolaPerusahaan	270	.00	.63	.1079	.20467
Valid N (listwise)	270				

Sumber : Lampiran 5 - Data Sekunder yang diolah (2020)

Pada tabel 4.1 untuk gambaran statistik deskriptif yang pertama adalah variabel dependen penelitian ini yaitu kebijakan anti korupsi. Dari tahun 2013-2018 nilai minum dari variabel kebijakan anti korupsi sebesar 0,000 (PTPP Tahun 2013-2018) dan nilai maksimum sebesar 0,8600 (WSKT Tahun 2018) menggambarkan bahwa masih ada perusahaan yang belum memiliki kebijakan anti korupsi sama sekali dan sudah ada yang memiliki kebijakan anti korupsi

yang hampir lengkap sebesar 86%. Nilai rata-rata untuk variabel dependen yaitu kebijakan anti korupsi sebesar 0,2723 dengan standar deviasi 0,1857.

Grafik 4.1 Mean Kebijakan Anti Korupsi



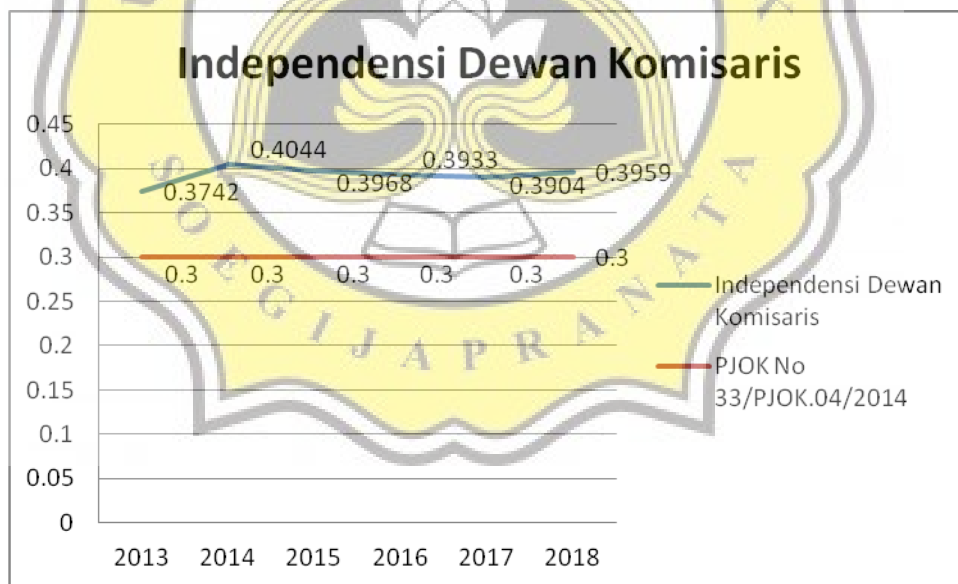
Sumber : Lampiran 6 - Data Sekunder yang diolah (2020)

Pada grafik 4.1 menggambarkan nilai rata-rata dari kebijakan anti korupsi dari tahun 2013-2018 di perusahaan sektor *property, real estate & building construction*, dimana nilai rata-rata cenderung mengalami peningkatan terutama di tahun 2018, walaupun di tahun 2016 sempat mengalami penurunan sebesar 0,0271 atau dapat dikatakan tidak ada penurunan yang signifikan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan sektor *property, real estate & building construction*

cenderung sudah memiliki kesadaran untuk memiliki dan melengkapi kebijakan anti korupsi di perusahaan masing-masing.

Statistik deskriptif untuk variabel independen yang pertama adalah variabel independensi dewan komisaris . Dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-rata serta standar deviasinya pada tabel 4.1, dimana nilai minimumnya sebesar 0,00 (MKPI Tahun 2018) , dan nilai maksimumnya sebesar 0,8300 atau 83% (LPKR Tahun 2016). Nilai rata-rata dewan komisaris yang independen di perusahaan property sebesar 0,3930 dengan standar deviasi sebesar 0,1133.

Grafik 4.2 Mean Independensi Dewan Komisaris

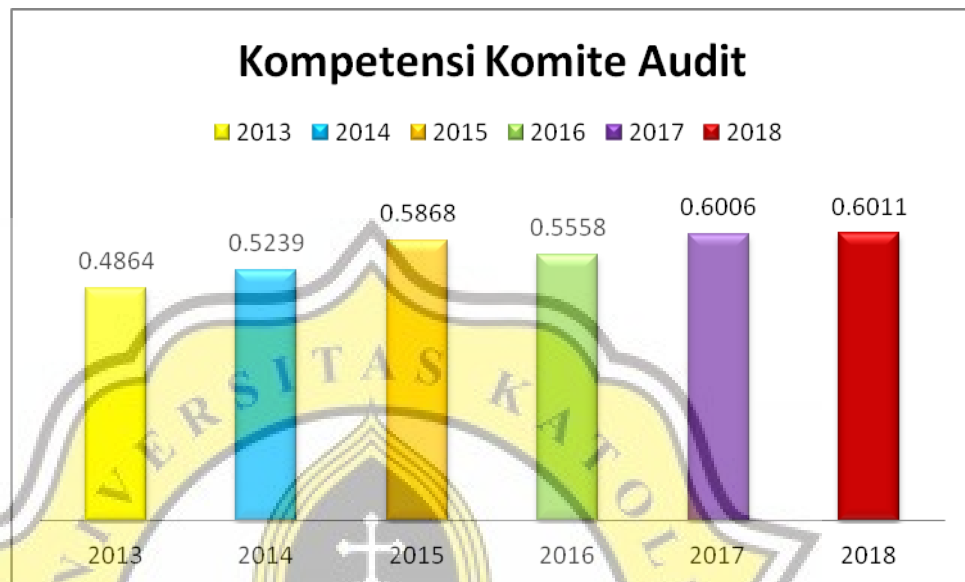


Sumber : Lampiran 6 - Data Sekunder yang diolah (2020)

Pada grafik 4.2 merupakan gambaran nilai rata-rata (*mean*) variabel independensi dewan komisaris dari tahun 2013-2018. Rata-rata independensi dewan komisaris perusahaan sektor *property, real estate, & building construction* lebih dari rata-rata yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/PJOK.04/2014 perusahaan harus memiliki dewan komisaris yang independen minimal sebesar 30%, sedangkan rata-rata dari grafik 4.2 dewan komisaris yang independen diatas 30%. Jadi dapat dikatakan bahwa rata-rata perusahaan sektor *property, real estate, & building construction* sudah memiliki dewan komisaris yang independen.

Pada tabel 4.1 tergambar bahwa komite audit yang ada disebuah perusahaan *property, real estate & building construction* masih ada yang belum berkompeten karena nilai minimum dari variabel ini sebesar 0,00 (MDLN Tahun 2013), akan tetapi sudah ada perusahaan yang memiliki komite audit sangat berkompeten karena memiliki nilai maksimum sebesar 1,00 atau 100% (BKSL Tahun 2016). Nilai rata-rata variabel ini sebesar 0,5671 dengan standar deviasi sebesar 0,2994.

Grafik 4.3 Mean Kompetensi Komite Audit



Sumber : Lampiran 6 - Data Sekunder yang diolah (2020)

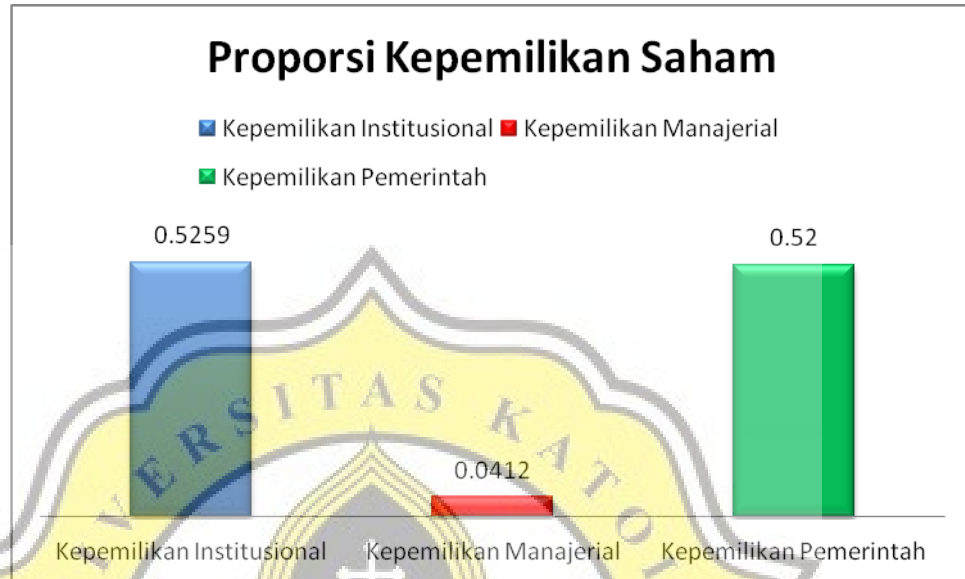
Pada grafik 4.3 menjelaskan mengenai rata-rata kompetensi komite audit, dimana perusahaan sektor *property, real estate & building construction* memiliki lebih dari 1 anggota komite audit yang berkompeten. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 pasal 7 menjelaskan bahwa perusahaan harus memiliki komite audit yang berkompeten dan minimal memiliki 1 anggota komite audit yang berlatar belakang dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Jadi kesimpulannya dari rata-rata tahun 2013-2018 pada perusahaan sektor *property, real estate & building construction* sudah memiliki minimal 1 komite audit yang berkompeten .

Statistik deskriptif selanjutnya menejaskan variabel independen kepemilikan, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah. Kepemilikan institusional tidak seluruhnya memiliki saham di perusahaan *property* karena nilai minimum dari variabel kepemilikan institusional dari tahun 2013-2018 sebesar 0,00 (BIKA Tahun 2016), dan untuk nilai maksimumnya atau nilai saham tertingginya sebesar 0,9500 atau 95% (SMDM Tahun 2014-2016). Nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 0,5259 dengan standar deviasi sebesar 0,2352.

Seorang manajer di perusahaan *property* tidak semuanya diberikan saham perusahaan karena nilai minimum dari tahun 2013-2018 sebesar 0,00 (ARMY 2017 dan 2018) dan ada perusahaan yang memberikan saham dalam nilai tinggi yaitu 0,84 (IDPR Tahun 2017). Nilai rata-rata sebesar 0,0412 dengan standar deviasi sebesar 0,1434.

Kepemilikan selanjutnya adalah kepemilikan pemerintah dimana pemerintah tidak selalu menanamkan sahamnya di perusahaan *property*, karena saham pemerintah paling rendah sebesar 0,000 (WEGE Tahun 2013-2018) dan paling tinggi nilai sahamnya di perusahaan *property* sebesar 0,6800 atau 68% (WSKT Tahun 2013). Nilai rata-rata kepemilikan pemerintah sebesar 0,0520 dengan standar deviasi sebesar 0,1650.

Grafik 4.4 Proporsi Kepemilikan Saham 1

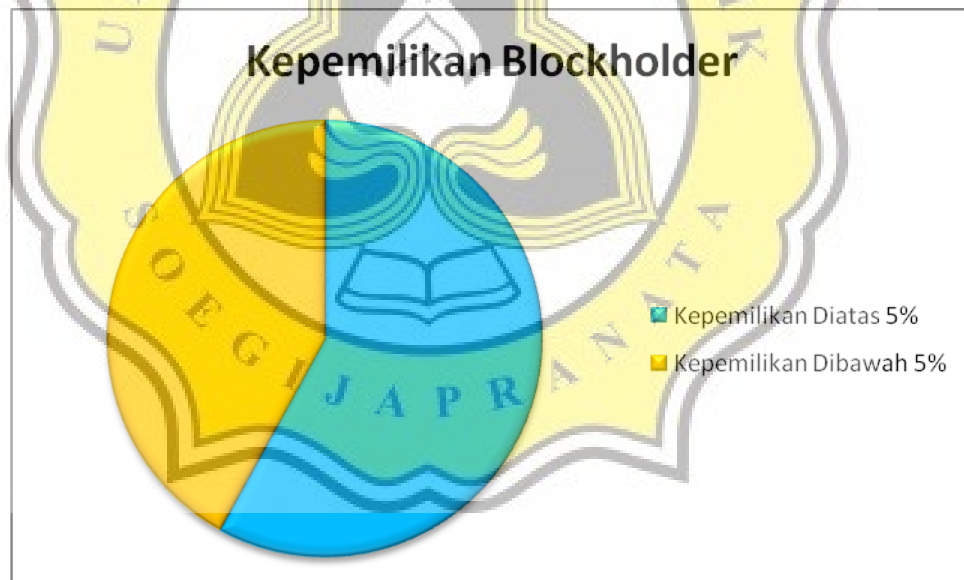


Sumber : Lampiran 6 - Data Sekunder yang diolah (2020)

Pada grafik 4.4 menggambarkan rata-rata proporsi kepemilikan saham yang ada di perusahaan sektor *property, real estate & building construction*. Dari grafik 4.4 kepemilikan institusional memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 0,5259 daripada kepemilikan manajer maupun kepemilikan pemerintah. Kepemilikan manajer di sektor *property, real estate & building construction* hanya sebesar 0,0412 dan kepemilikan pemerintah rata-rata nya hanya sebesar 0,5200, sehingga dari proporsi rata-rata kepemilikan yang ada di perusahaan, kepemilikan institusional memiliki saham yang dibidang dominan daripada kepemilikan lain.

Statistik deskriptif untuk kepemilikan *blockholder* tergambar pada tabel 4.1 dimana tidak semua perusahaan di sektor *property, real estate & building construction* memiliki kepemilikan saham *blockholder*, karena nilai paling kecil dari saham ini sebesar 0,05(MYRX Tahun 2017) dan kepemilikan *blockholder* yang paling besar yaitu sebesar 0,9500 atau 95% (SMDM 2014-2016) dari keseluruhan perusahaan tahun 2013-2018. Nilai rata-rata kepemilikan *blockholder* sebesar 0,5803 dengan standar deviasi sebesar 0,1983

Grafik 4.5 Mean Kepemilikan *Blockholder*

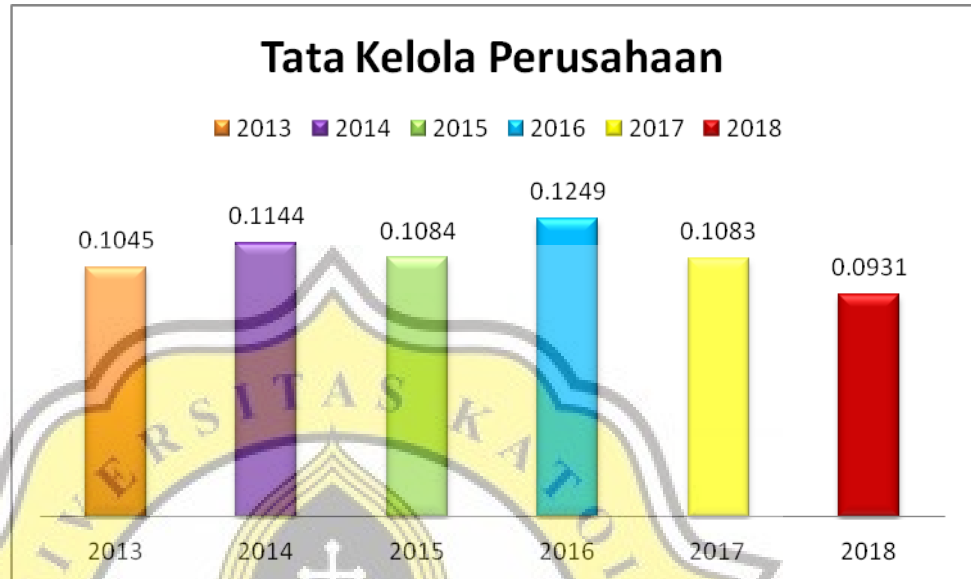


Sumber : Lampiran 5 - Data Sekunder yang diolah (2020)

Pada grafik 4.5 menggambarkan rata-rata kepemilikan *blockholder* di perusahaan *property, real estate & building construction* yaitu sebesar 50% ke atas hampir mencapai 60%, sedangkan kepemilikan lain hanya sebesar 40%, artinya kepemilikan saham yang ada di perusahaan sektor *property, real estate & building construction* lebih dominan dimiliki oleh pemegang saham yang nilai sahamnya lebih dari 5% daripada dimiliki oleh pemegang saham yang nilai sahamnya dibawah 5%.

Terakhir tata kelola perusahaan di bidang *property, real estate & building construction* selama 2013-2018 nilai minimumnya adalah sebesar 0,000 (TOTL Tahun 2014-2017) dan maksimumnya adalah sebesar 0,6300 atau 63% (ELTY Tahun 2017). Nilai rata-rata variabel tata kelola perusahaan sebesar 0,1079 dengan standar deviasi sebesar 0,2046.

Grafik 4.6 Mean Tata Kelola Perusahaan



Sumber : Lampiran 6 - Data Sekunder yang diolah (2020)

Pada grafik 4.6 yaitu variabel tata kelola perusahaan di perusahaan *peroperty, real estate & building construction* memiliki rata-rata sebesar 0,1079 dan fluktuatif yang artinya bahwa tata kelola perusahaan masih memiliki nilai yang belum maksimal, karena nilai yang belum maksimal tersebut mencerminkan bahwa tata kelola perusahaan di sektor *peroperty, real estate & building construction* belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik.

4.3 Uji Hipotesis

4.3.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

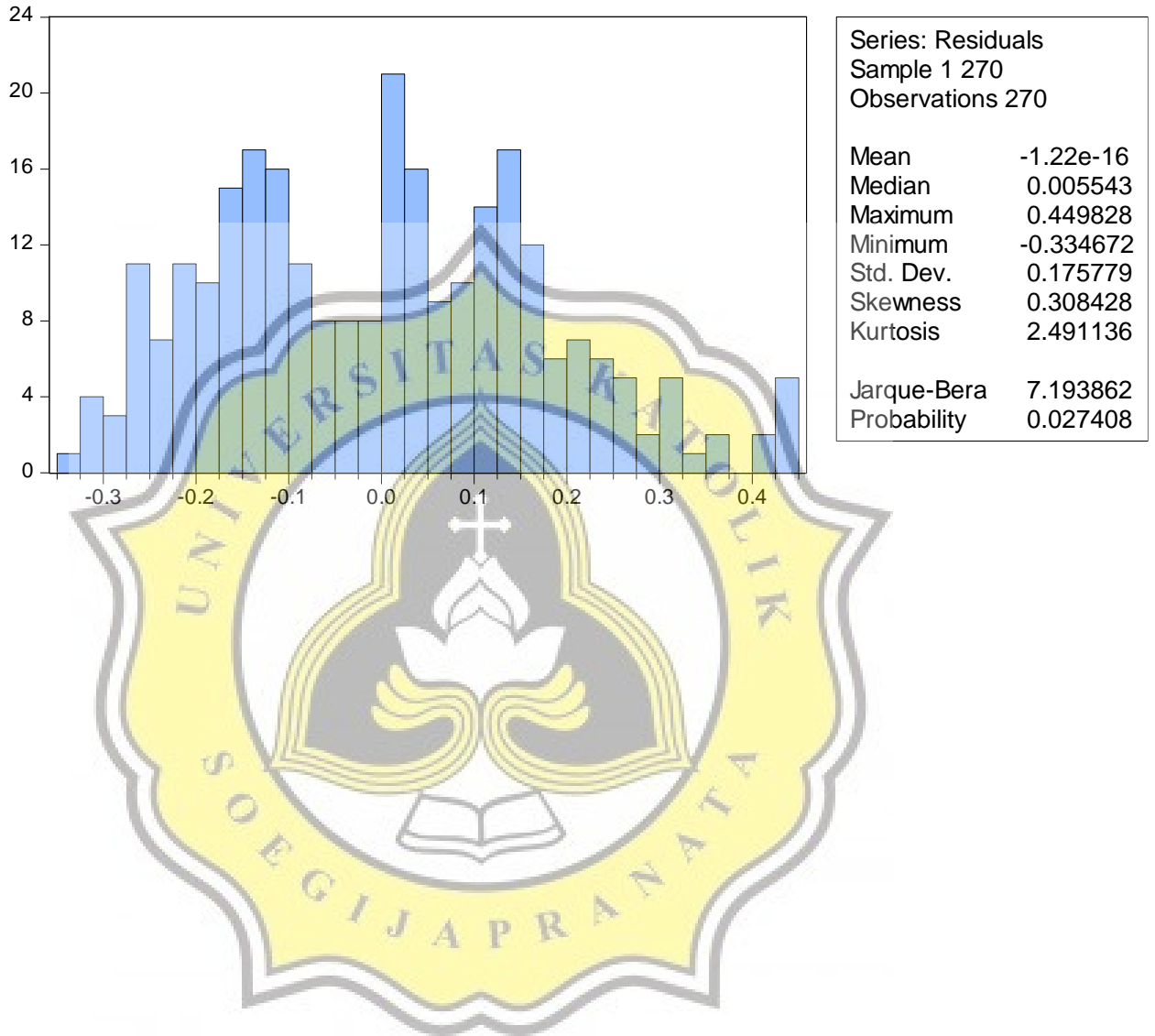
Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji-uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas :

a. Uji Normalitas

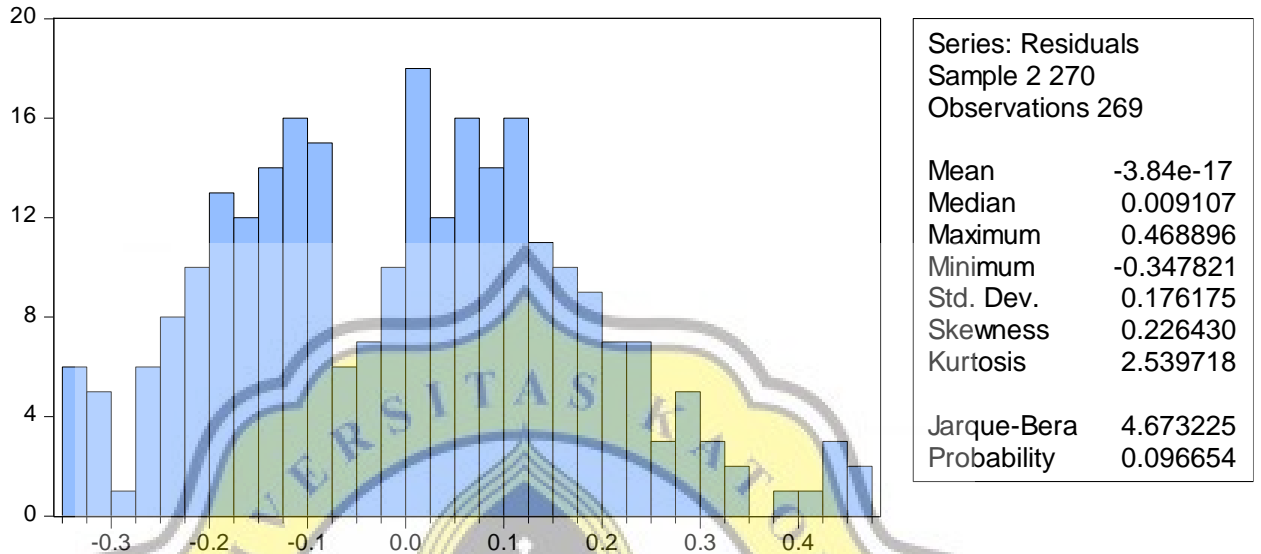
Pada penelitian ini untuk uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *histogram-normality test* yang tersedia di software eviews versi 9, dengan hasil pada tampilan diagram sebagai berikut :



Grafik 4.7 Hasil Uji Normalitas Awal



Grafik 4.8 Hasil Uji Normalitas Akhir



Sumber: Lampiran 4 - Data Sekunder yang diolah (2020)

Grafik 4.7 menunjukkan hasil uji normalitas awal dimana nilai *probability* hanya sebesar 0,0274 atau kurang dari 0,05 yang berarti hasil awal normalitas menunjukkan bahwa data tidak normal. Data tidak normal dikarenakan banyaknya outlier seperti yang tertera di lampiran 7. Maka dari itu peneliti melakukan pengurangan sampel yang awalnya jumlah sampel sebesar 340, lalu dikurangi menjadi hanya sebesar 270. Setelah mengurangi sampel peneliti melakukan pengujian histogram ulang dan mendapati hasil uji normalitas sesuai grafik 4.8, dimana hasil uji normalitasnya menjadi normal karena nilai

probability sebesar 0,0966 yang berarti data tersebut dapat dikatakan normal karena nilai *probability* nya lebih dari 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak masalah multikolinearitas, dan juga mengetahui apakah terjadi korelasi atau tidak antar variabel. Cara mengetahui ada atau tidaknya masalah multikolinearitas maka dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factors*). Data dikatakan tidak memiliki masalah multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$. Berikut adalah tabel 4.2 hasil dari pengolahan asumsi klasik untuk uji multikolinearitas :

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 09/18/20 Time: 01:57
 Sample: 1 270
 Included observations: 269

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.004036	34.06859	NA
Independensi Dewan Komisaris	0.010266	14.57017	1.096945
Kompetensi Komite Audit	0.001407	4.866505	1.057187
Kepemilikan Institusional	0.004660	13.02472	2.175969
Kepemilikan Manajerial	0.009082	1.708180	1.577072
Kepemilikan <i>Blockholder</i>	0.003723	1.326270	1.326209
Kepemilikan Pemerintah	0.006610	1.674165	1.522201

Sumber: Lampiran 8 - Data Sekunder yang Diolah (2020)

Berdasarkan nilai yang didapat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil pengujian multikolinearitas untuk tiap variabel independen nilai VIF nya < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW) dengan hasil yang ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Autokorelasi

Dependent Variable: Kebijakan Anti Korupsi
 Method: Least Squares
 Date: 09/18/20 Time: 01:57
 Sample (adjusted): 2 270
 Included observations: 269 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.041358	0.063532	0.650987	0.5156
Independensi Dewan Komisaris	0.190957	0.101323	1.884631	0.0606
Kompetensi Komite Audit	0.147268	0.037516	3.925529	0.0001
Kepemilikan Instiusional	0.118339	0.068267	1.733482	0.0842
Kepemilikan Manajerial	0.008525	0.095298	0.089456	0.9288
Kepemilikan <i>Blockholder</i>	-0.060163	0.061019	-0.985971	0.3251

Kepemilikan Pemerintah	0.261207	0.081302	3.212793	0.0015
Tata Kelola Perusahaan	-0.033736	0.064833	-0.520352	0.6033
R-squared	0.095964	Mean dependent var		0.272615
Adjusted R-squared	0.071718	S.D. dependent var		0.185289
S.E. of regression	0.178521	Akaike info criterion		-0.578928
Sum squared resid	8.318038	Schwarz criterion		-0.472022
Log likelihood	85.86586	Hannan-Quinn criter.		-0.535995
F-statistic	3.957910	Durbin-Watson stat		1.517297
Prob(F-statistic)	0.000396			

Sumber: Lampiran 9 - Data Sekunder yang Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui hasil pengujian autokorelasi sebesar 1,5172 yang berarti nilai *Durbin-Watson* penelitian ini lolos uji autokorelasi, dimana range untuk terhindar dari masalah autokorelasi adalah 1,5 - 2,46.

d. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas dilakukan untuk menguji apakah data terjadi heteroskedasitas atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji Glejser untuk menguji heteroskedasitas. Dari uji tersebut mendapatkan hasil yang ditampilkan tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.001074	Prob. F(7,261)	0.0553
Obs*R-squared	13.70152	Prob. Chi-Square(7)	0.0568

Sumber: Lampiran 10 - Data Sekunder yang Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui hasil pengujian heteroskedasitas dari nilai Prob.F sebesar 0,0553 yang berarti nilai tersebut memiliki nilai signifikan $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedasitas.

4.4 Pengujian Model Fit

Tabel 4.5 Hasil Uji Model Fit

R-squared	0.095964	Mean dependent var	0.272615
Adjusted R-squared	0.071718	S.D. dependent var	0.185289
S.E. of regression	0.178521	Akaike info criterion	-0.578928
Sum squared resid	8.318038	Schwarz criterion	-0.472022
Log likelihood	85.86586	Hannan-Quinn criter.	-0.535995
F-statistic	3.957910	Durbin-Watson stat	1.517297
Prob(F-statistic)	0.000396		

Sumber: Lampiran 11 - Data Sekunder yang Diolah (2020)

Dari tabel 4.5 diketahui nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi dependen dengan menggunakan model fit.

4.5. Pengujian Koefisien Determinasi

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.095964	Mean dependent var	0.272615
Adjusted R-squared	0.071718	S.D. dependent var	0.185289
S.E. of regression	0.178521	Akaike info criterion	-0.578928
Sum squared resid	8.318038	Schwarz criterion	-0.472022
Log likelihood	85.86586	Hannan-Quinn criter.	-0.535995
F-statistic	3.957910	Durbin-Watson stat	1.517297
Prob(F-statistic)	0.000396		

Sumber: Lampiran 12 - Data Sekunder yang Diolah (2020)

Dari tabel 4.6 diketahui nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,0717 yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 7,17% sedangkan sisanya 92,83% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.6 Pengujian Hipotesis

Peneliti melakukan pengujian hipotesis setelah melakukan semua asumsi klasik yang telah terpenuhi seperti yang tertera di atas. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t , berikut tabel 4.7 hasil dari pengujiannya :

Tabel 4.7 Hasil Uji t

Dependent Variable: Kebijakan Anti Korupsi

Method: Least Squares

Date: 09/18/20 Time: 01:57

Sample (adjusted): 2 270

Included observations: 269 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.041358	0.063532	0.650987	0.5156
Independensi Dewan Komisaris	0.190957	0.101323	1.884631	0.0606
Kompetensi Komite Audit	0.147268	0.037516	3.925529	0.0001
Kepemilikan Institusional	0.118339	0.068267	1.733482	0.0842
Kepemilikan Manajerial	0.008525	0.095298	0.089456	0.9288
Kepemilikan <i>Bockholder</i>	-0.060163	0.061019	-0.985971	0.3251
Kepemilikan Pemerintah	0.261207	0.081302	3.212793	0.0015
Tata Kelola Perusahaan	-0.033736	0.064833	-0.520352	0.6033

Sumber: Lampiran 13 - Data Sekunder yang Diolah (2020)

4.6.1 Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil analisis data yang ditampilkan pada tabel 4.7, diketahui bahwa nilai statistik t untuk variabel independensi dewan komisaris nilainya sebesar $1,8846 > 1,645$ yang berarti hipotesis variabel ini berpengaruh positif dan diterima, dimana semakin besar proporsi dewan komisaris yang independen maka semakin lengkap kebijakan anti korupsi di perusahaan.

Sebuah perusahaan dapat meminimalisir masalah keagenan dengan adanya dewan komisaris yang independen, karena dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajer yang

terkadang lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan pemegang saham yang dapat menurunkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan. Dewan komisaris yang independen bukan dewan komisaris dari pihak terafiliasi atau bisa juga disebut dengan pihak yang memiliki hubungan keluarga dan bisnis dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006) Karena hal itulah keputusan dewan komisaris independen dipastikan objektif sesuai dengan hasil pengawasannya selama bertugas.

Hasil dari uji hipotesis independensi dewan komisaris pada penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya milik (Hartomo, 2019) dan milik (Carrillo et al., 2019). Dimana semakin tinggi proporsi dewan komisaris yang independen maka semakin lengkap kebijakan anti korupsi disebuah perusahaan. Hasil dari hipotesis ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai dasar penilaian yang mendorong perusahaan memiliki atau melengkapi kebijakan anti korupsi sehingga dapat menjadi bentuk pencegahan adanya korupsi atau kecurangan di perusahaan. Selain itu hipotesis ini dapat membantu pemerintah dan OJK dalam memberantas korupsi dengan cara perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengeluarkan atau memiliki kebijakan anti korupsi.

4.6.2 Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.7, diketahui bahwa nilai statistik t untuk variabel kompetensi komite audit sebesar $3.9255 > 1,645$ yang artinya hipotesis dari variabel kompetensi komite audit pada penelitian ini berpengaruh positif sehingga variabel kompetensi komite audit diterima, dimana semakin tinggi besar proporsi komite audit yang berkompoten maka semakin lengkap kebijakan anti korupsi di perusahaan.

Salah satu yang dapat membantu pekerjaan seorang dewan komisaris adalah komite audit. Komite audit memiliki tugas untuk memberikan saran dan memberikan informasi dalam hal keuangan perusahaan kepada dewan komisaris secara lebih rinci. Komite audit merupakan salah satu dari beberapa komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris (Utama, 2004). Pengalaman komite audit ini juga menjadi salah satu bentuk kompetensi seorang komite audit yang sudah profesional dan dapat diandalkan ilmu serta kinerjanya di dalam perusahaan dan dalam membantu kinerja dewan komisaris untuk tujuan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Kompetensi komite audit dapat berupa latar belakang pendidikan yang mendalami ilmu keuangan atau yang sudah berpengalaman dalam hal keuangan walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan yang mendalami ilmu keuangan. Karena apabila

seorang komite audit berkompeten pasti memiliki ilmu mengenai pencegahan korupsi ataupun *fraud*.

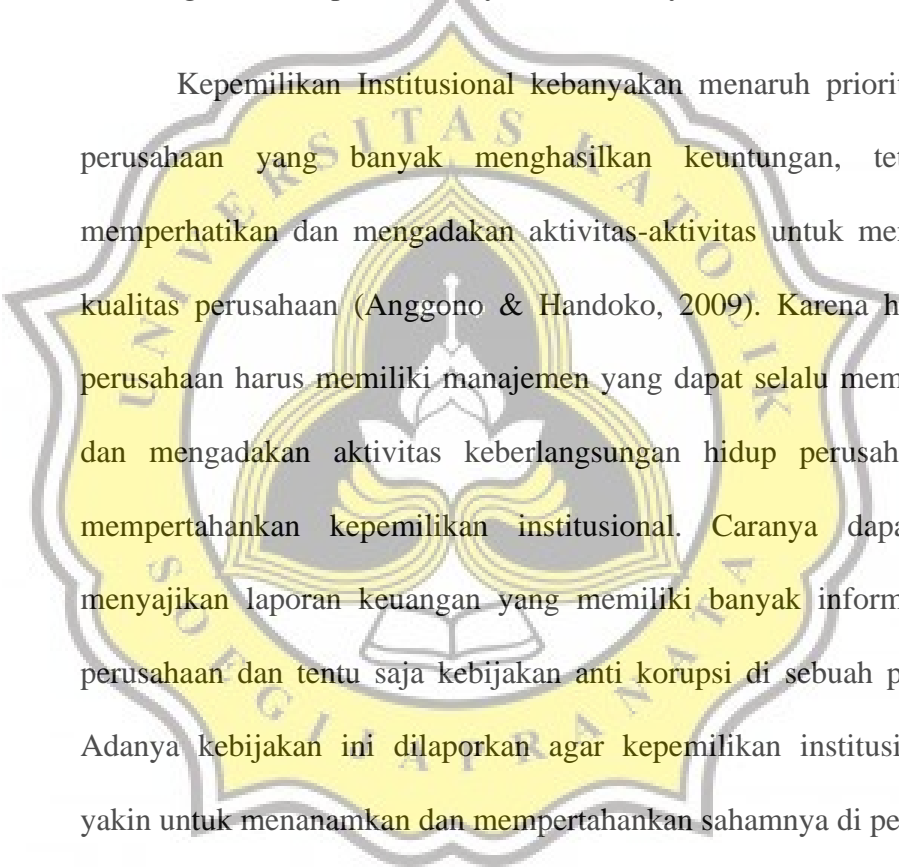
Hasil dari olah data penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya milik (Sheikh, 2019) dan juga penelitian milik (Madi, 2014) yang menyatakan ada hubungan antara kompetensi komite audit dengan pengungkapan. Semakin tinggi proporsi komite audit yang berkompeten maka akan semakin lengkap kebijakan anti korupsi di perusahaan yang apabila dibuat dan diterapkan dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham sesuai *theory of the firm*, serta kompetensi komite audit yang mumpuni akan membantu praktek pencegahan tindakan kecurangan atau korupsi di perusahaan bidang *property, real estate & building construction*.

4.6.3 Hipotesis Ketiga

Dari tabel 4.7 diketahui nilai statistik t untuk variabel struktur kepemilikan institusional sebesar 1.733482 angka tersebut $> 1,645$ yang artinya variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif sehingga hipotesis ini diterima, dimana semakin besar presentase kepemilikan institusional maka semakin lengkap kebijakan anti korupsi di perusahaan.

Kepemilikan institusional di perusahaan *bidang property, real estate & buiding construction* memiliki rata-rata kepemilikan saham institusional

50% dari saham yang beredar, rata-rata tersebut dapat dilihat dari tabel 4.1. dari rata-rata kepemilikan institusional tersebut dapat dikatakan bahwa institusi merupakan saham mayoritas, dimana saham mayoritas cenderung dapat mengurangi adanya konflik keagenan sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap saham mayoritas (Prasetyo, 2016)



Kepemilikan Institusional kebanyakan menaruh prioritas kepada perusahaan yang banyak menghasilkan keuntungan, tetapi tetap memperhatikan dan mengadakan aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan kualitas perusahaan (Anggono & Handoko, 2009). Karena hal tersebut perusahaan harus memiliki manajemen yang dapat selalu memperhatikan dan mengadakan aktivitas keberlangsungan hidup perusahaan untuk mempertahankan kepemilikan institusional. Caranya dapat dengan menyajikan laporan keuangan yang memiliki banyak informasi terkait perusahaan dan tentu saja kebijakan anti korupsi di sebuah perusahaan. Adanya kebijakan ini dilaporkan agar kepemilikan institusional lebih yakin untuk menanamkan dan mempertahankan sahamnya di perusahaan.

Hasil dari olah data untuk variabel kepemilikan institusional selaras dengan milik (Anggono & Handoko, 2009) dan (El-diftar et al., 2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi presentase kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi pengungkapan sukarela perusahaan karena institusional dapat memonitor, membatasi, dan

memengaruhi perilaku manajer untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik

4.6.4 Hipotesis Keempat

Dari tabel 4.7 diketahui nilai statistik t untuk variabel keempat penelitian ini yaitu struktur kepemilikan manajerial sebesar 0,0894 atau angka tersebut $< 1,645$ yang berarti variabel struktur kepemilikan manajerial hipotesisnya ditolak.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Di dalam perusahaan memberikan saham kepada manajer bukan hal yang tabu lagi akan tetapi tidak semua perusahaan memberikan saham kepada manajer (CEO dan komisaris), hal ini karena setiap perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing. Perusahaan berharap dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer maka kinerja manajer akan meningkat dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga pemegang saham lainnya serta mengurangi konflik kepentingan yang mementingkan tujuan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri. Akan tetapi pada penelitian ini kepemilikan manajer tidak membuat manajer mengeluarkan kebijakan anti korupsi di perusahaan.

Presentase rata-rata kepemilikan manajerial di perusahaan sektor *property, real estate & building construction* yaitu kurang lebih 10% dimana presentase tersebut membuat manajer memiliki hak suara, tetapi hak suaranya belum tentu digunakan karena masih ada kepemilikan yang presentase kepemilikannya lebih dominan daripada kepemilikan manajer. Oleh karena presentase kepemilikan yang rendah tersebut kepemilikan manajer di perusahaan sektor *property, real estate & building construction* tidak dapat mempengaruhi kelengkapan kebijakan anti korupsi yang diungkapkan secara sukarela. Selain itu kepemilikan manajerial yang rendah tidak berpengaruh terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan hipotesis penelitian ini. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian milik (Juhmani, 2013) dan (Huafang & Jianguo, 2007).

4.6.5 Hipotesis Kelima

Dari tabel 4.7 diketahui nilai statistik t untuk hipotesis variabel kelima struktur kepemilikan *blockholder* sebesar -0,9859 angka tersebut < 1,645 yang berarti variabel struktur kepemilikan *blockholder* hipotesisnya ditolak.

Kepemilikan *blockholder* merupakan kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham setidaknya 5% dari kepemilikan saham beredar. Kepemilikan *blockholder* berarti bahwa saham dikendalikan oleh

sekelompok kecil orang yang dapat berupa seorang individual, perusahaan lain atau investor institusional. Kepemilikan *blockholder* di penelitian ini cenderung terkonsentrasi karena nilai rata-rata kepemilikan saham di perusahaan bidang *property, real estate & buiding construction* lebih dominan dimiliki oleh kepemilikan diatas 5%, sesuai dengan grafik 4.5 . Kepemilikan *blockholder* yang cenderung terkonsentrasi, membuat *blockholder* menginginkan manajer untuk memberikan dividen yang besar terhadap *blockholder*, karena *blockholder* hanya berfokus kepada harga saham dan prospek keuntungan perusahaan kedepannya daripada menggunakan kekuatan kepemilikannya sebagai pengawas untuk mendorong manajer memiliki atau melengkapi kebijakan anti korupsi perusahaan. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian milik (Hutomo, 2019) dan (Juhmani, 2013).

4.6.6 Hipotesis Keenam

Dari tabel 4.7 diketahui nilai statistik t dari tabel untuk hipotesis keenam yaitu variabel struktur kepemilikan pemerintah sebesar 3,2127 nilai tersebut lebih dari 1,645 yang artinya variabel ini berpengaruh positif sehingga hipotesis diterima. Dimana semakin besar proporsi kepemilikan pemerintah maka semakin lengkap kebijakan anti korupsi perusahaan.

Menurut (Nathania dan Joshua, 2017) kepemilikan saham oleh pemerintah dapat membantu perusahaan dalam menyatukan kepentingan

antara manajer dengan pemegang saham. Dalam mekanisme kerjanya pemerintah mempunyai aturan yang jelas. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah bisa menjadi sistem pengawasan yang efektif dan efisien dalam mengawasi kinerja manajemen dan akan memberikan dampak pada keuangan sebuah perusahaan. Perusahaan yang dimiliki pemerintah pastilah harus memberikan nilai yang lebih kepada masyarakat untuk menjaga kredibilitasnya, sehingga dapat dipastikan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah cenderung mempunyai dan melengkapi kebijakan anti korupsinya. Selain untuk menjaga kredibilitas dapat mencegah terjadinya korupsi di sebuah perusahaan sehingga tidak akan merugikan pemerintah dan negara. Penelitian (Eng & Mak, 2003) menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan oleh kepemilikan saham pemerintah dengan adanya pengungkapan kebijakan yang terstruktur di perusahaan atau emiten. Hal ini karena pemerintah diharapkan dapat menanamkan modal di perusahaan untuk jangka panjang sehingga perusahaan dapat lebih mudah mengakses ke berbagai sumber keuangan. Penelitian tersebut didukung penelitian milik (Hartomo, 2019).

4.6.7 Hipotesis Ketujuh

Dari tabel 4.7 diketahui nilai statistik t untuk variabel tata kelola perusahaan sebesar -0,5203 nilai tersebut $< 1,645$ yang berarti variabel tata kelola perusahaan tersebut hipotesisnya ditolak.

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang penting di dalam sebuah perusahaan, hal ini karena tata kelola perusahaan menjadi salah satu tonggak keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Apabila tata kelola disuatu perusahaan kurang baik atau malah buruk maka kualitas dan keberlangsungan hidup perusahaan akan menurun. Tata kelola perusahaan timbul karena adanya pemisahan kepentingan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan atau bisa juga disebut sebagai masalah keagenan. Perusahaan memiliki harapan dengan adanya tata kelola perusahaan dapat menjadi sistem yang memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada pemegang saham (Ariningtika, 2013). Tata kelola perusahaan memiliki asas-asas yang harus dijalani agar tetap selaras dengan tujuan diadakannya sistem tata kelola perusahaan. Asas tersebut meliputi : Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran

Rata-rata variabel tata kelola perusahaan nilainya mulai dari 1% hingga 5% yang cenderung kurang maksimal nilainya, sehingga dapat dikatakan bahwa tata kelola perusahaan di sektor *property, real estate & building construction* cenderung belum memenuhi asas-asas tata kelola perusahaan yang baik. Jadi dapat dikatakan apabila tata kelola suatu perusahaan nilainya belum maksimal maka akan ada kecenderungan tidak memberikan informasi secara transparan dan lengkap termasuk mengenai informasi kebijakan anti korupsi. Maka hipotesis untuk tata kelola

perusahaan ditolak dan penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian milik (Carrillo et al., 2019) dan (Rasheed & Yazdanifard, 2013).

4.7 Pembahasan

Dari total tujuh variabel independen yang ada di penelitian ini saat sesudah melakukan pengujian hipotesis yang diterima hanya ada empat variabel, yaitu variabel independensi dewan komisaris, kompetensi komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan pemerintah. Variabel independensi dewan komisaris diterima karena di perusahaan sektor *property, real estate & buiding construction* banyak memiliki dewan komisaris yang independen rata-rata jumlah dewan komisaris yang independen yaitu 1 hingga 3 orang dewan komisaris dari total 4 hingga 6 dewan komisaris secara keseluruhan. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yang independen di perusahaan dapat mendorong untuk adanya kebijakan anti korupsi. Begitupula dengan variabel kompetensi komite audit, dimana komite audit yang ada di perusahaan sektor *property, real estate & buiding construction* rata-rata berkompeten karena 1 atau 2 dari total keseluruhan komite audit sebanyak 3 hingga 4 orang, memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan dibidang akuntansi maupun keuangan. Ilmu yang dimiliki tersebut membantu dewan komisaris meminimalisir kecurangan dengan memberikan saran dan masukan adanya kebijakan anti korupsi di perusahaan. Kepemilikan institusional cenderung menanamkan sahamnya di perusahaan yang tidak hanya memikirkan

profit saja akan tetapi juga aktivitas perusahaan yang berupa tanggungjawab social seperti melengkapi kebijakan anti korupsi di laporan keuangan tahunan. Kepemilikan pemerintah

Sedangkan variabel yang tidak diterima berjumlah tiga variabel, yaitu variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan *blockholder* dan juga tata kelola perusahaan. Untuk kepemilikan rata-rata alasannya karena adanya perbedaan kepentingan dan jumlah saham yang terkonsentrasi sehingga menyebabkan tidak ada pengaruh terhadap variabel dependen penelitian ini yaitu kebijakan anti korupsi. Sedangkan untuk tata kelola perusahaan pada sektor *property, real estate & buiding construction* belum dikatakan baik karena nilai rata-rata yang dihasilkan belum memenuhi standar *good governance* yaitu memenuhi asas-asas yang ada.

Penelitian ini dilakukan karena di latar belakang oleh tingginya tingkat korupsi di Indonesia dan masih terus menjadi penyebab kerugian banyak pihak. Perusahaan swasta menjadi salah satu penyeter korupsi terbanyak. Sektor *property, real estate & building construction*, ini masuk ke dalam sepuluh besar sektor pemetaan korupsi yang memberikan nilai kerugian negara, nilai suap, pungutan liar, dan pencucian uang yang cukup besar. Seingga penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti karena masih banyak kasus korupsi yang terjadi, dan juga karena peneliti menempuh pendidikan akuntansi yang juga penting untuk mempelajari mengenai hal-hal apa saja yang dapat mmepengaruhi

sebuah perusahaan dalam pembentukan kebijakan terutama kebijakan anti korupsi. Perusahaan di Indonesia masih sedikit perusahaan yang memiliki kebijakan anti korupsi dan ada beberapa faktor penyebab hal itu terjadi. Beberapa faktor itu dapat dari variabel-variabel independen yang diteliti oleh peneliti.

Manfaat dari penelitian ini berupa manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat kebijakan. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah ingin memberikan kontribusi teoritis yang lebih luas dalam memahami hubungan antara *Theory Of The Firm* dengan tata kelola perusahaan dalam kelengkapan kebijakan anti korupsi perusahaan. Sedangkan untuk manfaat praktis dalam penelitian ini adalah pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk praktek pencegahan tindakan korupsi di perusahaan, dan untuk manfaat terakhir yaitu manfaat kebijakan adalah mendukung OJK dalam menerapkan salah satu peraturan yang ada pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 32/SEOJK.04/2015 untuk membantu perusahaan, pemerintah dan OJK dalam mengurangi dan memerangi korupsi di Indonesia.